

## ABSTRAK

**Judul:** “Partai Politik & *Nation State*, Revitalisasi Fungsi Kebangsaan Partai Politik”

Keberadaan partai politik di era reformasi diamini sebagai pilar penting dalam memperkuat demokrasi sekaligus pilar kebangsaan. Paling tidak, kehadiran partai politik menjadi pintu mudah untuk mengagregasi beragam aspirasi berdasarkan irisan kebhinnekaan warga bangsa. Selama ini fungsi dan peran partai politik lebih berfokus pada ranah seleksi elit dan sirkulasi suksesi kekuasaan. Hal tersebut sebagai sebuah kemestian, karena partai politik hadir untuk mempengaruhi bahkan mengubah kekuasaan. Di sisi lain, sekat sosial-budaya dan politik tidak jarang melahirkan diferensiasi yang berujung pada intoleransi. Fakta ini seakan mengkonfirmasi kekhawatiran para pendiri negara bangsa terhadap kemunculan partai politik sebagai penyumbang disintegrasi dan pemecah kebersamaan sebagai bangsa. Paling tidak perhatian partai politik terhadap masalah toleransi tidak sekuat ikhtiarnya terhadap partisipasi dan mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan. Merebaknya kecenderungan negasi bahkan diskriminasi atas dasar etnisitas, agama, dan sekat sosial lainnya tidak banyak mendapatkan respons dari partai politik. Berangkat dari realitas tersebut, penelitian ini berusaha mencari jawab atas tingkat responsi partai politik terhadap problem toleransi sebagai dasar kebangsaan yang majemuk dan langkah yang harus dilakukan untuk memperkuat kebersamaan warga bangsa dengan tetap menjunjung pluralitas.

Penempatan partai politik sebagai variabel penting dalam upaya peneguhan toleransi sebagai dasar eksistensi negara bangsa (*nation-state*) tidak terlepas dari peran strategis dan ranah kuasanya yang eksekutif baik pada ranah negara (*state*) dan warga (*society*). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah secara kritis kerangka dasar partai politik di Indonesia baik melalui dokumen-dokumen primer maupun wawancara langsung dengan key informan baik secara individu maupun kelembagaan, termasuk simpul-simpul sosial. Melalui telaah dan wawancara mendalam, penelitian ini berusaha menemukan sekaligus menawarkan solusi atas problem krisis toleransi seiring dengan menguatnya negasi dan intoleransi di tengah sistem demokrasi dirayakan.

Hipotesis yang terbangun dalam konteks nasionalisme di mata partai politik adalah adanya pelemahan atau pengabaian terhadap dinamika yang berlangsung di tengah masyarakat seiring menguatnya elitisme dan oligarkisme partai politik. Partai politik dengan posisinya yang sangat strategis belum berhasil menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan integrasi melalui penguatan sikap toleran di tengah publik yang majemuk. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya respons yang komprehensif terhadap menguatnya eskalasi politik yang berlangsung di tengah masyarakat. Partai politik cenderung menjadi penonton bahkan tidak jarang menjadi bagian yang memperkeruh relasi sosial. Karena itu, langkah-langkah konstruktif harus dilakukan melalui penguatan peran partai politik dalam mengagregasi kepentingan publik yang majemuk, sehingga kecenderungan intoleransi dapat terkoreksi, paling tidak terlokalisasi.

Melalui teori partai politik, *nation-state*, multikulturalisme, dan toleransi, penelitian ini mengukur korelasi dan signifikansi peran partai politik dalam merawat multikulturalisme melalui penguatan toleransi yang terinstitusionalisasi baik pada individu maupun kelembagaan partai. Konsepsi besar tentang kebangsaan (nasionalisme) yang berbasis pada realitas sosial yang majemuk akan menguat apabila toleransi sebagai landasan sikap dan perilaku kewargaan berjalan kelindan dengan langkah partai politik. Indikator lain yang menjadi pijakan analisis terhadap korelasi partai politik dengan bangunan *nation state* adalah tindakan korupsi sebagai aktualisasi

dari sikap egoisme baik atas nama individu maupun kelompok dengan menegasikan kepentingan individu atau kelompok lainnya. Bukti bahwa partai politik belum sepenuhnya menjadi bagian bagi penguatan bangunan nation state terlihat dari tindakan korupsi yang masih menjadi bagian kuat dari partai politik dan belum adanya keberpihakan secara maksimal terhadap penguatan toleransi.

**Keyword:** Partai politik, *nation-state*, kebhinnekaan, toleransi, multikulturalisme, anti korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).